



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(D P R D)
KOTA PARIAMAN**

JALAN SITI MANGGOPOH NO. PARIAMAN TELP. (0751) 690960

PIMPINAN DPRD KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA PARIAMAN
NOMOR : **24** /KEP/DPRD/2024
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Pariaman Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 05 Tahun 2023 Tentang APBD Kota Pariaman Tahun 2024;
8. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
9. Peraturan DPRD Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

Memperhatikan : Laporan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pariaman bersama Tim Asistensi Ranperda Pemerintah Kota Pariaman dan OPD Terkait pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Pariaman Tahun 2025 yang berjumlah 20 (Dua Puluh) Rancangan Peraturan Daerah, yang terdiri dari 17 Ranperda yang diusulkan dari Pihak Eksekutif dan 3 Ranperda yang diusulkan oleh Pihak Legislatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Wali Kota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah :

- 1) mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- 2) menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- 3) mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
- 4) akibat pembatalan oleh Menteri atas Peraturan Daerah Kota; dan
- 5) perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PARIAMAN

KETUA,



MUHAJIR MUSLIM, Lc

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Wali Kota Pariaman di Pariaman.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA PARIAMAN

NOMOR : 24 /KEP/DPRD/2024

TANGGAL : 22 NOVEMBER 2024

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PEMRAKARSA	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH				
1	PERDA	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025	APBD Kota Pariaman Tahun 2025	v		Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2004	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari
2	PERDA	Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun 2024	v		PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari
3	PERDA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026	APBD Kota Pariaman Tahun 2026	v		Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2004	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari
4	PERDA	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman	Nomenklatur OPD dan Penyederhanaan Birokrasi		v	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari
5	PERDA	Penyelenggaraan Perpustakaan	Penyelenggaraan Perpustakaan	v		1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PEMRAKARSA	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH				
6	PERDA	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Pemberian penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM serta kebebasan dasar penyandang disabilitas	v		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas	Dinas Sosial Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari
7	PERDA	Rencana Pembangunan Industri Kota Pariaman Tahun 2023-2043	Pedoman Jangka Panjang Bagi Pemerintah dan UMKM dalam Perencanaan Pengembangan Industri Kota Pariaman	v		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari
8	PERDA	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	v		1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari
9	PERDA	Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		v	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari
10	PERDA	Perangkat Desa	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Perangkat Desa		v	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari
11	PERDA	Badan Permusyawaratan Desa	Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa		v	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PEMRAKARSA	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH				
12	PERDA	RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029	RPJKM Merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Untuk Periode 5 Tahun Terhitung Sejak Dilantik Sampai Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah	v		Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara, Perencanaan, Pengendalian dan Evakuasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	April
13	PERDA	Perlindungan Lahan Berkelanjutan	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	v		Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari
14	PERDA	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Menetapkan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pelayanan secara terpadu di Daerah	v		a. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari
15	PERDA	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengelolaan Air Limbah	v		Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Perkim dan LH Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD PEMRAKARSA	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIA
				BARU	UBAH				
16	PERDA	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	v		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Januari
17	PERDA	Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kota Pariaman	Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kota Pariaman meliputi : 1. Industri Halal, 2. Pariwisata Halal, 3. Usaha Pondok	v		1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pemerintah Sumatera Barat berlandaskan kepada Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah 2. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Sumatera Barat	Bagian Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Juli
18	PERDA INISIATIF DPRD	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17, Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum		v	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6)	INDRA JAYA, ST (Anggota DPRD Kota Pariaman)	DPRD Kota Pariaman	Januari
19	PERDA INISIATIF DPRD	Tentang Pengelolaan Irigasi	Pengelolaan Irigasi	v			RIZA SAPUTRA, S.Pd (Anggota DPRD Kota Pariaman)	DPRD Kota Pariaman	Januari
20	PERDA INISIATIF DPRD	Tentang Kemakmuran Mesjid	Kemakmuran Mesjid	v			MUHAJIR MUSLIM, Lc (Ketua DPRD Kota Pariaman)	DPRD Kota Pariaman	Januari

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PARIAMAN



MUHAJIR MUSLIM, Lc



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 /180/2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Program Penyusunan yang selanjutnya disebut Progsun.
 2. Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU.
 3. Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disingkat PP.
 4. Peraturan Presiden yang selanjutnya disebut Perpres.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Permendagri.
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Permenpan RB.
 7. Peraturan Menteri Kesehatan yang selanjutnya disebut Permenkes.
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Perda.
 9. Peraturan Wali Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Perwako.
 10. Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Ranperwako.
 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa.
 14. Target Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
16. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
17. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dishub.
18. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN.

- KEDUA : Daftar Ranperwako untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, *h*


ROBERIA *ra*

PARAF KOORDINASI PRODIKUM HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAR PANTAMAN	<i>h 25/ 25</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	<i>h 25/ 25</i> <i>sum/ -21</i>



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 /180/2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

DAFTAR PENYUSUNAN RANPERWAKO TAHUN 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
1.	Standar Harga Satuan Desa.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penyusunan APB Desa Tahun 2025 dan Standar Harga Satuan.	Pemerintah Kota Pariaman. Januari 2025
2.	Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun 2025.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penyusunan APB Desa Tahun 2025 dan Standar Harga Satuan.	Pemerintah Kota Pariaman. Januari 2025
3.	Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penyusunan APB Desa Tahun 2026 dan Standar Harga Satuan.	Pemerintah Kota Pariaman. Januari 2025
4.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah	Bagian Organisasi	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.	Pemerintah Kota Pariaman. Maret 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
	Kota Pariaman.		Dasar Hukum: Permenpan RB 1 Tahun 2020		
5.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.	Bagian Organisasi	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 1 Tahun 2023	Pedoman bagi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman terkait Tata Naskah Dinas.	Pemerintah Kota Pariaman. Maret 2025
6.	Teknis Pembembeian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.	BPKPD	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Keriga Belas kepada ASN di Pemerintah Kota Pariaman. Dasar Hukum: PP Nomor 14 Tahun 2024	Pengaturan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada ASN di Pemerintah Kota Pariaman.	Pemerintah Kota Pariaman. Maret 2024
7.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	BPKPD	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar Hukum: 1. UU Nomor 1 Tahun 2022; 2. Perda Nomor 1 Tahun 2024.	1. Tata cara penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 2. Tata Cara perhitungan Nilai sewa reklame 3. Besaran nilai perolehan air tanah; 4. Masa pajak dan tahunan pajak; 5. Pemanfaatan penerimaan retribusi; dan 6. Tata cara pemungutan pajak dan retribusi.	Pemerintah dan Masyarakat Kota Pariaman. Maret 2024
8.	Dokumen	Bappeda	1. Sebagai upaya	Berisi profil	Pemerintah



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
	Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Pariaman Tahun 2022-2027.		mewujudkan pembangunan sanitasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan, perlu perencanaan yang berkualitas sebagai acuan pelaksanaan pembangunan sanitasi; dan 2. Dokumen strategis sanitasi kota sudah disepakati secara nasional sebagai dokumen perencanaan strategis bidang sanitasi yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan sanitasi 5 tahun kedepan.	sanitasi, kebijakan dan strategi serta program kegiatan pembagunan sanitasi secara komprhensif untuk memberikan arah yang jeas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi di kota untuk 5 (lima) tahun kedepan.	Kota Pariaman. Maret 2024
9.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum.	Bagian Organisasi	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: Permenhub Nomor 27 Tahun 2018	Struktur organisasi dan tata kerja.	Dishub. Mei 2025
10.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Minum.	Bagian Organisasi	Perubahan perangkat daerah menjadikan Unit Pelaksana Teknis Dinas juga berubah dan melaksanakan	Struktur organisasi dan tata kerja.	DPUPRP dan pihak terkait. Mei 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: PP 122 Tahun 2015		
11.	Dinas Kesehatan.	Bagian Organisasi	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyesuaian dan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan. Dasar Hukum: Permenkes 5 Tahun 2022	Struktur organisasi dan tata kerja.	Dinas Kesehatan. Mei 202
12.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	Bagian Organisasi	Perubahan perwako untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif agar selaras dengan nomenklatur dan pengelompokan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Susunan organisasi dan tata kerja.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mei 2025
13.	Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman	Bagian Organisasi	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-	Peta jabatan.	ASN Kota Pariaman. Mei 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			undangan dalam menetapkan peta jabatan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dasar Hukum: PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2020		
14.	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.	Bagian Organisasi	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/22/m.sm.01.00/2024 tanggal 8 Januari 2024. Dasar Hukum: PermenpanRB Nomor 39 Tahun 2013	Kelas Jabatan.	ASN Kota Pariaman. Mei 2025
15.	Standar Harga Satuan.	BPKPD	Kebutuhan dalam Penyusunan APBD. Dasar Hukum: Perpres 33 Tahun 2020	Penyusunan APBD Kota Pariaman.	Pemerintah Kota Pariaman. Juni 2025
16.	Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.	Bagian Organisasi	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permenpan RB 7 Tahun 2022	Untuk menciptakan Penyederhanaan Birokrasi melalui struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
17.	Analisis Standar Belanja Tahun 2026.	BPKPD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 77 Tahun 2020	Penyusunan APBD Kota Pariaman.	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025
18.	Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2026.	BPKPD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 77 Tahun 2020	Penyusunan APBD Kota Pariaman.	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025
19.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.	Bappeda	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 86 Tahun 2017	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2026.	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025
20.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.	Bappeda	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 86 Tahun 2017	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025
21.	Rencana Detail Tata Ruang Kota Pariaman Tahun 2025-2045.	DPUPRP	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: 1. UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Pariaman Tahun 2025.	Pemerintah Kota Pariaman. September 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			2. PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. Perda 5 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Pariaman Tahun 2022-2042.		
22.	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2025-2029.	Bappeda	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan ketentuan Pasal 16 ayat 4 Perpres Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun; 2. Perpres 42 Tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi; 3. Perpres 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan strategis pangan dan gizi.	Materi Pokok: 1. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi merupakan Pedoman Rencana Aksi Bidang Pangan dan Gizi yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung pemenuhan pangan dan Gizi masyarakat; 2. Penyusunan program yang spesifik untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi; dan 3. Menetapkan indikator dalam memantau pelaksanaan rencana aksi. Ruang lingkup: 1. Peningkatan	Masyarakat Kota Pariaman. September 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
				ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman; 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi; dan 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.	
23.	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2028.	Bappeda	Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan target RPJMN Tahun 2020-2024 dan pencapaian TPB/SDGs. Dasar Hukum: UU 18 Tahun 2012	Materi Pokok: 1. Analisa Situasi; 2. Rencana Aksi; 3. Pelaksanaan Rencana Aksi; dan 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. Ruang Lingkup Faktor Determinan Pangan dan Gizi Terintegrasi. Objek Pengaturan Pangan dan Gizi.	Meningkatnya sumber daya manusia berkualitas berdaya saing dan meningkatnya ketahanan pangan. Oktober 2024/9
24.	Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah	Bagian Organisasi	Melaksanakan Ketentuan Peraturan	Pedoman bagi Perangkat Daerah yang	Tersusunnya Peraturan tentang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
	Kota Pariaman.		Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 10 Tahun 2024	ada di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman terkait Pakaian Dinas Dinas.	Pakaian Dinas. Oktober 2025
25.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Air Bersih.	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 79 Tahun 2018	Penyusunan Rencana Strategis.	Pemerintah Kota Pariaman. Desember 2025
26.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Air Bersih.	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 79 Tahun 2018	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.	Pemerintah Kota Pariaman. Desember 2025
27.	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Air Bersih.	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 79 Tahun 2018	Penyusunan Tata Kelola.	Pemerintah Kota Pariaman. Desember 2025
28.	Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun 2026.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 20 Tahun 2018	Penyusunan APB Desa Tahun 2026 dan Standar Harga Satuan.	Pemerintah Kota Pariaman. Desember 2025
29.	Pedoman Penyusunan APBDesa 2026.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Penyusunan APB Desa Tahun 2026 dan Standar Harga Satuan.	Pemerintah Kota Pariaman. Desember 2025



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			Dasar Hukum: Permendagri 20 Tahun 2018		
30.	Tata Cara Penyaluran Anggaran Dana Desa Tahun 2026.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Permendagri 20 Tahun 2018	Penyusunan APB Desa Tahun 2026 dan Standar Harga Satuan.	Pemerintah Kota Pariaman. Desember 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, *h*

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>f 25/11/24</i>
ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	<i>f 25/11/24</i>
PERANCANG PERATURAN KOTA PARIAMAN	<i>21/11/24</i>



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 152/180/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
10/180/2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penambahan Rancangan Peraturan Walikota Pariaman ke dalam daftar Program Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 10/180/2025 Program Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 10/180/2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Sebanyak 5 (lima) Rancangan Peraturan Wali Kota ditambahkan ke dalam daftar Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT PARIAMAN	
ANSTRAS (PENGANTARAAN DAN BERTANGGUNGJAWAB)	
KABAG HUKUM	12/4/25
PETUNJANG BAKASURAH	1/4-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 152 /180/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA PARIAMAN NOMOR 10/180/2025
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

DAFTAR PENYUSUNAN RANPERWAKO TAHUN 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
31.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025	Perubahan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025
32.	Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Perangkat Desa	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa	Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Perangkat Desa	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025
33.	Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah. Dasar Hukum: Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2025 Untuk Seluruh OPD	lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Mei 2025
34.	Biaya Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pariaman	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Menyediakan landasan hukum yang jelas mengenai penggunaan belanja rumah tangga Jabatan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mei 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			Daerah Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
35.	Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	DPRD	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.	Penyusunan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD Kota Pariaman	Pemerintahan Kota Pariaman Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KELOMPOK KERJA	
SISTEM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RAKYAT	
KABAGTILKUM	P 22/A-25
KEPENCANG PERATUAN PERENCANAAN DAN LEGISLASI	4-25